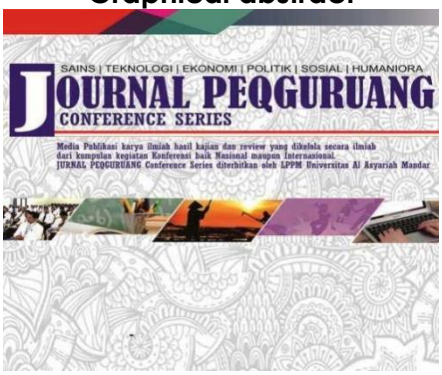
Journal
Peqguruang: Conference Series
eISSN: 2686-3472

JPCS
Vol. 8 No. 2 Nov. 2026

Graphical abstract



PERANAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENINGKATKAN LITERASI BAGI MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI

[1*]Nurlia, [1]Muhammad Nadir, [1]Siti Maryam
[1]Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
nurlia0404@gmail.com

Abstract

This study specifically aims to determine the role of the Polewali Mandar Regency Regional Library in improving literacy, its work programs, and the supporting and inhibiting factors. Data were collected through observation, documentation, and interviews with eleven informants. The results indicate that the library effectively carries out its multidimensional role (inclusive education, digital literacy, reading culture, community partnerships, and civic literacy strengthening) through five program strategies. This success is supported by national A accreditation, professional librarians, and high daily visits. However, optimal role optimization is still hampered by regional budget limitations, geographical constraints of mobile fleets, weak internet access, a lack of popular books, weak promotion, and the exclusivity of communal spaces to certain visitors. As a solution, this study recommends establishing SOPs for spatial zoning, transparent reservation systems for communal rooms, and strict supervision by library staff.

Keywords: *Role Of Regional Libraries, Improving Literacy, Social Inclusion*

Abstrak

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengetahui peran Perpustakaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan literasi, program kerjanya, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan sebelas informan. Hasil penelitian menunjukkan perpustakaan efektif menjalankan peran multidimensional (pendidikan inklusif, literasi digital, budaya baca, kemitraan komunitas, serta penguatan *civic literacy*) melalui lima program strategis. Keberhasilan ini didukung oleh Akreditasi A nasional, pustakawan profesional, dan tingginya kunjungan harian. Namun, optimalisasi peran masih terhambat oleh keterbatasan APBD, kendala geografis armada keliling, fluktuasi internet, kurangnya buku populer, lemahnya promosi, dan eksklusivitas ruang komunal oleh pengunjung tertentu. Sebagai bentuk solusi, penelitian ini merekomendasikan penetapan SOP pembagian zona ruang baca, transparansi sistem reservasi ruang komunal, serta pengawasan ketat oleh pengelola perpustakaan.

Kata kunci: *Peranan Perpustakaan Daerah,Peningkatan Literasi, Inklusi Sosial*

Article history
DOI: 10.35329/jp.v8i2.7455
Received : *05-10-2026* | **Received in revised form :** *25-10-2026* | **Accepted :** *25-11-2026*

1. PENDAHULUAN

Literasi merupakan kompetensi mendasar yang memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia dan masyarakat pada era global. Dalam perspektif kontemporer, literasi tidak lagi dipahami secara sempit sebatas kemampuan mekanis membaca dan menulis, melainkan sebagai kecakapan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam berbagai konteks kehidupan sosial (Hastuti, 2025). Perkembangan teknologi digital dan arus informasi yang semakin cepat menempatkan kemampuan literasi sebagai kebutuhan utama agar masyarakat mampu menyaring informasi, menghindari disinformasi (hoaks), dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, individu akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan global (Jalaludin, 2021).

Literasi tidak hanya menjadi kemampuan individu, tetapi juga membentuk dinamika sosial yang lebih inklusif. Masyarakat dengan tingkat literasi tinggi cenderung mampu berkomunikasi secara efektif, berpartisipasi dalam wacana publik, dan berkolaborasi menyelesaikan berbagai isu bersama, sehingga mendukung terciptanya tatanan masyarakat demokratis yang inklusif (Silviah, 2024). Dalam konteks pembangunan global, Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan literasi sebagai elemen kunci untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Negara dengan tingkat literasi tinggi terbukti memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, produktif, dan adaptif terhadap perubahan peradaban (Madina, 2023).

Di era digital saat ini, penguatan literasi menghadapi tantangan berupa banjir informasi (*infodemic*) yang memerlukan kemampuan kritis untuk memverifikasi kebenaran. Pada kondisi ini, hoaks dan disinformasi sering kali memanipulasi opini publik tanpa mempedulikan etika sosial. Kemampuan ini bukan sekadar hal teknis, melainkan melibatkan tanggung jawab individu untuk menyaring informasi valid dari yang palsu, sehingga mencegah penyebaran ujaran kebencian dan polarisasi masyarakat (Nasrullah dkk., 2017). Oleh karena itu, penguatan literasi harus dipahami sebagai upaya multidimensional yang melibatkan aspek kognitif, sosial, dan kultural secara simultan.

Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan Gerakan Literasi Nasional (GLN) dan penguatan literasi dalam Kurikulum Merdeka guna membangun budaya literasi secara berkelanjutan. Berbagai program dirancang untuk mendorong kebiasaan membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi. Namun, capaian literasi nasional masih menghadapi tantangan serius. Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca peserta didik Indonesia secara konsisten berada di bawah rata-rata negara OECD, khususnya dalam aspek pemahaman, penalaran, dan analisis teks ilmiah (OECD, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan literasi yang dirancang belum sepenuhnya berdampak secara merata.

Rendahnya capaian literasi tersebut mencerminkan lemahnya budaya baca di masyarakat secara umum akibat persepsi bahwa literasi merupakan tanggung jawab institusi pendidikan formal semata. Padahal, penguatan literasi memerlukan ekosistem yang mendukung, termasuk ketersediaan ruang belajar nonformal, akses terhadap bahan bacaan yang beragam, serta lingkungan sosial yang kondusif (Anwaratus Sai'ah, 2025). Lembaga seperti perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, dan komunitas literasi memiliki peran penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh sistem pendidikan formal.

Permasalahan literasi menjadi semakin kompleks pada konteks lokal, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas informasi. Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sosial dan budaya yang besar, namun masih menghadapi tantangan dalam pengembangan literasi masyarakat. Keterbatasan infrastruktur, minimnya bahan bacaan yang relevan dengan tren modern, serta rendahnya kebiasaan membaca menyebabkan literasi belum berkembang secara optimal di tingkat pedesaan. Membaca belum menjadi bagian dari budaya sehari-hari, melainkan masih dianggap aktivitas akademik yang terbatas pada lingkungan sekolah formal. Kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat Polewali Mandar turut memengaruhi pola akses terhadap informasi, di mana sebagian besar warga masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi harian, sehingga literasi belum menjadi prioritas utama (Nasya, 2025).

Dari perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), keberadaan perpustakaan daerah tidak sekadar berfungsi sebagai tempat penyediaan bahan bacaan, melainkan sebagai wadah utama dalam membangun literasi kewarganegaraan (*civic literacy*). Literasi kewarganegaraan didefinisikan sebagai kemampuan warga negara untuk mengakses, menganalisis, menyikapi, dan memanfaatkan informasi secara kritis serta bertanggung jawab demi menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya (Lestari, 2020). Rendahnya tingkat literasi berimplikasi langsung pada melemahnya partisipasi publik yang cerdas (*smart and good citizen*) serta meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap manipulasi disinformasi yang mengancam integrasi sosial. Keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar pada hakikatnya menjalankan fungsi strategis sebagai instrumen negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Melalui pendekatan PPKn Kemasyarakatan dan inklusi sosial, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana peran multidimensional perpustakaan daerah berdampak langsung pada penguatan *civic literacy* dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal (IFLA & McKee, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) untuk memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai peranan Perpustakaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan literasi masyarakat. Menurut Sugiyono (2020) pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini bukan mengukur variabel secara statistik, melainkan menggali proses, pengalaman empiris, persepsi sosiologis, dan makna di balik praktik-praktik literasi yang dijalankan oleh institusi publik dan bagaimana masyarakat lokal merespons layanan tersebut.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan durasi penelitian aktif selama tiga bulan yang mencakup tahap pra-lapangan (studi pendahuluan dan pengurusan izin), pekerjaan lapangan (observasi dan wawancara), serta analisis data intensif. Penentuan informan dilakukan secara sengaja menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yakni memilih subjek yang memiliki kapasitas informasi linier dan pemahaman mendalam mengenai objek yang diteliti. Total informan dalam penelitian ini adalah 11 orang.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*) sebagai instrumen kunci yang bertugas membangun *rapport*, mengajukan pertanyaan, memotret fenomena, dan mengonstruksi situasi sosial di lapangan agar bermakna. Adapun instrumen penunjang meliputi pedoman wawancara semiterstruktur, catatan lapangan (*field notes*), alat perekam suara, dan kamera dokumentasi digital.

Teknik pengumpulan data menerapkan Triangulasi Teknik untuk menjamin keabsahan dan keandalan data. Tiga metode yang dikombinasikan meliputi: (1) Observasi Partisipatif Pasif, di mana peneliti hadir langsung di ruang baca, ruang multimedia, dan area bermain anak Perpustakaan Daerah Polewali Mandar untuk mengamati interaksi pelayanan tanpa terlibat dalam aktivitas internal; (2) Wawancara Semiterstruktur secara mendalam (*in-depth interview*) bersama pengelola dan pengunjung; serta (3) Dokumentasi, berupa pengumpulan arsip kelembagaan, regulasi Perda, inventaris sarana prasarana, statistik kunjungan, dan foto kegiatan lapangan.

Analisis data mengadopsi Model Interaktif (*Interactive Model*) yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang membagi alur analisis ke dalam tiga tahapan simultan: (1) Kondensasi Data (*Data Condensation*), berupa proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data mentah dari transkrip wawancara dan catatan lapangan; (2) Penyajikan Data (*Data Display*), menyusun sekumpulan informasi terstruktur dalam bentuk narasi teks, matriks, dan tabel agar mudah dipahami; serta (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), melakukan peninjauan ulang, membandingkan data melalui triangulasi sumber, hingga merumuskan kesimpulan akhir yang valid, objektif, dan kontekstual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kluster Program Kerja Literasi

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer di lapangan, ditemukan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar mengimplementasikan lima kluster kebijakan program strategis dalam menstimulasi minat baca dan kecerdasan masyarakat. Kelima program tersebut dirancang untuk mereduksi hambatan sosiokultural serta memperluas aksesibilitas informasi, yaitu:

1. Program Revitalisasi Perpustakaan Desa: Berorientasi pada pendekatan desentralisasi layanan literasi di tingkat akar rumput (*grassroot*). Pihak dinas secara agresif melakukan kunjungan dan pendataan kondisi riil infrastruktur ruang baca ke 50 desa di wilayah Kabupaten Polewali Mandar guna mengaktifkan kembali peran perpustakaan desa sebagai agen perubahan sosial terkecil.
2. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling dan Pojok Baca: Merupakan strategi jemput bola (*outreach services*) untuk meruntuhkan stigma perpustakaan sebagai gedung yang kaku. Armada bergerak ini mengunjungi institusi pendidikan formal (sekolah) di wilayah pedesaan secara periodik serta menyediakan titik baca eksternal di ruang publik.
3. Agenda Lomba Kreatif Kompetitif dan Bimtek Penulisan: Agenda rutin berupa Lomba Resensi Buku, Lomba Bertutur (*storytelling*) tingkat anak-anak, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan lokal. Program ini berfungsi sebagai instrumen *branding* kelembagaan untuk memutus fenomena ketidaktahuan publik (*public unawareness*) terhadap fasilitas literasi daerah.
4. Metode Membaca Nyaring (*Read Aloud*) bagi Anak Usia Dini: Menyasar segmen anak usia emas (*golden age*) melalui kemitraan aktif bersama praktisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan komunitas literasi lokal di ruang bermain anak lantai dasar.
5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS): Perluasan fungsi perpustakaan menjadi pusat multimedia melalui penyediaan laboratorium komputer, jaringan internet nirkabel (Wi-Fi gratis), serta penyediaan ruang komunal terbuka untuk pembinaan kapasitas ekonomi pelaku UMKM lokal.

ANALISIS MULTIDIMENSIONAL PERANAN PERPUSTAKAAN

Eksistensi Perpustakaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai lembaga berstatus Akreditasi A Nasional terbukti memegang peranan yang sangat krusial dan

multidimensional. Peran nyata institusi publik ini tidak lagi terbatas sebagai tempat sirkulasi buku teks tradisional (*book-oriented*), melainkan telah bertransformasi total menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*community-oriented*). Empat dimensi peran utama yang berhasil diaktualisasikan meliputi:

Pertama, Peran Penyedia Layanan Pendidikan Universal Inklusif. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pendidikan di luar kluster formal, perpustakaan ini mengayomi ruang lingkup pemustaka yang sangat luas tanpa batasan usia maupun jenjang ekonomi. Kebijakan membebaskan seluruh biaya akses (gratis) merupakan implementasi nyata dari amanat Pasal 31 UUD 1945 mengenai hak mendapatkan pendidikan, guna mewujudkan visi mencerdaskan kehidupan bangsa di tingkat lokal. Standardisasi mutu ini dibuktikan dengan kepemilikan ragam koleksi yang mencapai 29.782 judul buku cetak dan digital yang dikelola secara profesional oleh tenaga fungsional pustakawan.

Kedua, Peran Fasilitator dan Media Transformasi Literasi Digital. Di era disrupsi informasi, perpustakaan daerah bertindak sebagai agen pelaksana keterbukaan informasi publik yang memotong keterbatasan finansial masyarakat dalam mengakses teknologi internet. Penyediaan Fasilitas Multimedia berupa laboratorium komputer sirkulasi membantu kelompok mahasiswa dan pelajar memperluas cakupan riset ilmiah, berburu referensi jurnal online, serta membangun kecakapan memfilter informasi demi menghindari disinformasi.

Ketiga, Peran Stimulator Budaya Baca Melalui *Outreach Services*. Perpustakaan berperan aktif mematahkan persepsi kaku-formal birokrasi melalui operasional armada keliling dan pojok baca. Langkah dinamis ini efektif menumbuhkan kesadaran pentingnya belajar mandiri di luar kelas formal bagi anak-anak dan remaja di pedesaan.

Keempat, Peran Penguat Literasi Usia Emas dan Kemitraan Komunitas. Melalui penyediaan fasilitas ramah anak, perpustakaan berhasil mengaktifkan jalinan kemitraan multisektoral bersama Balai Bahasa Provinsi, Gerakan *Read Aloud* Polman, dan Komunitas Kunyu untuk membangun ekosistem budaya baca yang ramah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

EVALUASI EFEKTIVITAS PERANAN KELEMBAGAAN

Tingkat efektivitas peranan Perpustakaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dinilai sangat efektif pada tingkat manajerial makro-regulasi dan memadai pada pemenuhan kebutuhan kognitif pemustaka digital. Keberhasilan meraih Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI menjadi bukti formal bahwa variabel *input* (koleksi terstandar, tata ruang gedung 4 lantai, dan SDM pustakawan linear) berada pada kategori sangat memadai. Dampak fungsional di lapangan tercermin dari dinamika statistik kunjungan harian yang konsisten melampaui angka 100 orang per hari, didominasi oleh pelajar SMA dan mahasiswa tingkat akhir yang menyusun tugas akhir seperti skripsi dan karya ilmiah. Penyelenggaraan agenda lomba kreatif terbukti memiliki efektivitas tinggi sebagai media penembus dinding ketidaktahuan masyarakat remaja yang semula tidak menyadari keberadaan sarana edukasi gratis ini. Demikian pula program intervensi dini metode *read aloud* divalidasi oleh praktisi guru PAUD mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengayaan struktur kognitif, imajinasi, dan penambahan kosakata anak usia emas, sekaligus mengalihkan anak-anak dari ketergantungan gawai hiburan digital yang destruktif.

Dampak Strategis Perpustakaan Daerah terhadap Penguatan *Civic Literacy* (Literasi Kewarganegaraan)

Integrasi layanan perpustakaan daerah berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan *civic literacy* masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hasil analisis lapangan, kontribusi perpustakaan terhadap literasi kewarganegaraan teraktualisasi dalam tiga dimensi utama:

1. Pemenuhan Hak Konstitusional dan Keadilan Akses Informasi: Kebijakan pembebasan biaya pendaftaran dan akses seluruh fasilitas gratis merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial (Pancasila Sila ke-5) serta pemenuhan hak atas pendidikan inklusif sesuai Pasal 31 UUD 1945.
2. Pembentukan Tanggung Jawab Digital dan Resiliensi terhadap Disinformasi: Penyediaan fasilitas laboratorium multimedia dan pendampingan pustakawan membekali pemustaka dengan keterampilan *civic media literacy*. Kemampuan memverifikasi kesahihan data dan menyaring berita palsu (hoaks) sangat vital dalam menjaga iklim demokrasi lokal yang kondusif dan mencegah polarisasi sosial di era digital (Silviah, 2024).
3. Penguatan Ruang Publik Demokrasi dan Karakter Warga Negara (*Smart and Good Citizen*): Transformasi perpustakaan menjadi *third place* (ruang ketiga) memungkinkan terjadinya interaksi lintas kelompok sosiologis tanpa membedakan latar belakang sosial-ekonomi (Oldenburg, 1999; Rahayu & Kurniawan, 2022). Ruang ini melatih kedewasaan berdemokrasi masyarakat melalui wacana publik, kegiatan diskusi, serta pembentukan karakter warga negara yang kritis, adaptif, dan berdaya secara ekonomi melalui program literasi terapan (TPBIS).

ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Akselerasi program kerja kelembagaan di lapangan dipengaruhi oleh interaksi variabel internal organisasi dan respons eksternal masyarakat sosiologis. Peneliti mengklasifikasikan faktor pendukung utama ke dalam beberapa poin: (1) Akreditasi A Nasional yang menjamin kredibilitas sistem pelayanan sesuai pedoman baku Standar Nasional Perpustakaan (SNP); (2) Ketersediaan tenaga fungsional pustakawan profesional lulusan

rumpun ilmu perpustakaan yang cakap mengelola sistem temu kembali informasi (Wayan dkk., 2024); (3) Modernisasi prasarana multimedia berupa laboratorium komputer dan koneksi Wi-Fi gratis; (4) Jaringan kemitraan multisektoral yang luas melalui penandatanganan MoU bersama perguruan tinggi lokal (Unsulbar, Universitas Terbuka) dan Balai Bahasa; serta (5) Tingginya antusiasme dukungan kunjungan harian dari kelompok akademisi.

Namun, di balik capaian prestasi tersebut, hasil penelitian mendeteksi adanya kendala struktural, finansial, teknis, dan sosiologis yang menjadi faktor penghambat peranan perpustakaan daerah, yang meliputi:

1. Keterbatasan Anggaran Daerah (APBD): Kebijakan efisiensi fiskal di tingkat Kabupaten Polewali Mandar memicu ketergantungan kronis instansi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, yang berimplikasi langsung pada terhentinya beberapa program kemitraan bersama komunitas literasi lokal akibat ketiadaan dana stimulan operasional daerah.
2. Kendala Geografis dan Kerusakan Armada Bergerak: Karakteristik geomorfologi Polewali Mandar yang kontras (pesisir hingga pegunungan di 16 kecamatan) memperparah hambatan penjangkauan. Mobil perpustakaan keliling sering mengalami kendala kerusakan teknis dan terhambat oleh akses jalanan desa yang rusak parah, sehingga menciptakan kesenjangan pemenuhan hak literasi bagi masyarakat pedesaan rural (Fadillah dkk., 2025).
3. Fluktuasi Jaringan Internet dan Kuantitas Perangkat: Kapasitas *bandwidth* jaringan Wi-Fi di dalam gedung sering lambat (*lemot*) serta jumlah unit fisik komputer layanan masih sangat terbatas, sehingga menjadi hambatan kognitif bagi mahasiswa yang membutuhkan akses cepat penelusuran pangkalan data online.
4. Kurangnya Pembaruan Koleksi Buku Populer: Terjadi kesenjangan (*gap*) relevansi materi, di mana buku teks perkuliahan spesifik dan variasi judul fiksi novel remaja di rak sirkulasi dinilai sudah usang dan kurang mutakhir mengikuti perkembangan kurikulum modern.
5. Lemahnya Strategi Publikasi Promosi: Kurangnya komunikasi publik memicu miskonsepsi sosiologis di masyarakat umum yang mengira masuk ke perpustakaan dipungut biaya atau tidak mengetahui adanya fasilitas ruang bermain anak gratis. Selain itu, terdapat ketidakpahaman teknis pemustaka dalam mengoperasikan mesin digital Anjungan Perpustakaan Mandiri (APM).
6. Fenomena Eksklusivitas Ruangan (Inklusivitas Semu): Munculnya tindakan pengklaiman ruang komunal secara sepihak oleh kelompok pengunjung tertentu untuk aktivitas internal/Zoom mereka yang mencederai prinsip keadilan akses informasi (*intellectual freedom*) dan mengganggu kenyamanan pengunjung umum lainnya (Liriwati dkk., 2024).

4. SIMPULAN

Perpustakaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar memegang peranan multidimensional yang sangat krusial dan efektif dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat melalui lima kluster program strategis. Dari perspektif pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan, institusi publik berstatus Akreditasi A ini sukses menjalankan fungsi strategis negara sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat dan pemenuh hak konstitusional warga negara atas edukasi inklusif yang dibuktikan dengan tingginya volume kunjungan harian melampaui 100 orang serta penguatan kecakapan *civic literacy* masyarakat. Keberhasilan operasional didukung oleh kompetensi pustakawan profesional yang linier, modernisasi prasarana multimedia, serta jaringan kemitraan multisektoral yang luas bersama kampus dan komunitas *grassroot*.

Namun, optimalisasi peranan perpustakaan daerah masih terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran daerah (APBD) yang memicu stagnasi program kemitraan, kendala geografis topografi pedesaan dan kendala teknis armada mobil keliling, fluktuasi *bandwidth* internet, kelangkaan pembaruan buku teks ilmiah/fiksi populer, lemahnya strategi promosi, serta tantangan sosiologis berupa fenomena inklusivitas semu akibat pengklaiman sepihak ruang baca oleh kelompok tertentu.

Sebagai rekomendasi solutif yang berkeadilan, pihak pengelola perpustakaan mendesak untuk: (1) Mengesahkan *Standard Operating Procedure* (SOP) penggunaan ruang publik yang membagi secara tegas antara *Quiet Zone* (ruang baca tenang) dan *Collaborative Zone* (ruang diskusi/Zoom); (2) Menerapkan sistem penjadwalan peminjaman ruang komunal (*booking system*) berbasis transparan agar tidak didominasi oleh kelompok tertentu; (3) Melakukan pengawasan dan penertiban berkala oleh petugas layanan di area ruang komunal; (4) Mendorong komitmen penguatan alokasi APBD daerah untuk perawatan armada keliling dan peningkatan *bandwidth* Wi-Fi; serta (5) Melakukan peremajaan koleksi buku sesuai kebutuhan pemustaka era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Anwaratus Sai'ah. (2025). Dalam sunyi kata: Kemerdekaan menyusuri literasi sebagai jalan inovasi. Dalam Antologi Esai Literasi Sebagai Fondasi Kemerdekaan Berpikir dan Berinovasi (hlm. 1–4). Arpus Press.

Fadillah, R., Desmaryani, R., & Lestari, A. (2025). Analisis ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedesaan. Adijaya, 3(2), 217–225.

Hastuti, A. L. T. (2025). Literasi digital: Kunci sukses belajar dan berkarya di era teknologi. Dicoding.

IFLA, & McKee, B. (2020). International Federation of Library Associations and Institutions: ISBD,

International Standard Bibliographic Description. Library Guidelines Series, 173–204.

Jalaludin. (2021). Upaya menumbuhkan budaya literasi di kalangan mahasiswa. Jurnal Literasiologi, 7(1), 1–19.

Lestari, P. (2020). Edukasi kewarganegaraan nonformal: Mengembangkan ruang publik sebagai wahana belajar masyarakat. Jurnal Civic: Media Kajian Kewarganegaraan, 17(1), 88–99.

Liriwati, F. Y., Rahmawati, E., & Safitri, N. (2024). Etika penggunaan fasilitas publik dan pencegahan inklusivitas semu di perpustakaan daerah. Jurnal Informasi dan Perpustakaan, 5(1), 45–58.

Madina, K. (2023). Peran literasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Green Network Asia. https://greennetwork.id/ikhtisar/peran-literasi-dalam-mendukung-pembangunan-berkelanjutan/

Nasrullah, R., Aditya, W., & Satya, T. I. (2017). Materi pendukung literasi digital. Tim GLN Kemendikbud.

Nasya, S. A. (2025). Ketidakmerataan akses pendidikan dasar dan literasi siswa sekolah dasar di kota dan desa sebagai cermin kesenjangan sosial. UNAIR Media.

OECD. (2019). PISA 2018 results (Volume I): What students know and can do. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en

Oldenburg, R. (1999). The great good place: Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Marlowe & Company.

Rahayu, S., & Kurniawan, D. (2022). Transparansi dan keadilan akses informasi dalam pelayanan perpustakaan publik. Jurnal Sains Informasi, 10(2), 112–125.

Silviah, R. (2024). Dampak literasi digital: Kepercayaan publik, partisipasi politik dan media sosial. Jurnal Greenation Sosial Dan Politik, 2(1), 38–45.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Wayan, N., Budi, S., & Pd, M. (2024). Manajemen sumber daya manusia perpustakaan menuju pelayanan yang berkualitas. Media Sains Informasi Dan Perpustakaan, 4(2), 52–62